

IKK Outcome Dinas Tenaga Kerja

No.	Urusan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Ketenagakerjaan	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke R1KD}}{\text{jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ 1.022/2.153x100%=47,47%	Dinas Tenaga Kerja
		2) Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$ 909/25.619x100%=3,55%	Dinas Tenaga Kerja
		3) Tingkat produktifitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$ 19.895.335,20/642.038x100%=3.098,778%	Dinas Tenaga Kerja
		4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\%$ 93/433x100%=21,48%	Dinas Tenaga Kerja
		5) Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	$\frac{\text{jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$ 10.621/12.171=87,26%	Dinas Tenaga Kerja
2	Transmigrasi	-	Tahun 2022 tidak ada pemberangkatan peserta transmigrasi 0	Dinas Tenaga Kerja

IKK Output Dinas Tenaga Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	Outcome	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Ketenagakerjaan	1	1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	0	Dinas Tenaga Kerja
			2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$ 0	Dinas Tenaga Kerja
			3) Jumlah perusahaan yg menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	0	Dinas Tenaga Kerja
		2	1) Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{jumlah penerapan program PBK kualifikasi MMN atau lainnya pada tahun n}}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100\%$ 8/14x100%=57,14%	Dinas Tenaga Kerja
			2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{jumlah tenaga kerja keseluruhan jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100\%$ 8/11x100%=72,73%	Dinas Tenaga Kerja
			3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun n}}$ 11/220=0,05	Dinas Tenaga Kerja
			4) Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja

			$3/50 \times 100\% = 6\%$	
		5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdaftar pada tahun n}} \times 100\%$ $50/50 \times 100\% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
		6) Jumlah penganggur yang dilatih	100	Dinas Tenaga Kerja
		7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100\%$ $100/100 \times 100\% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
		8) Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100\%$ $201/240 \times 100\% = 68,75\%$	Dinas Tenaga Kerja
		9) Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$ $220/320 \times 100\% = 68,75\%$	Dinas Tenaga Kerja
		10) Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI), calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">0</p>	Dinas Tenaga Kerja
		11) Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja
3		1) Persentase perusahaan yang menerapkan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja

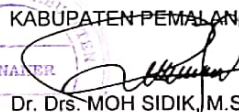
		program peningkatan produktifitas	$0/433 \times 100\% = 0\%$	
		2) Data tingkat produktifitas total		Dinas Tenaga Kerja
	4	1) Persentase perusahaan yg telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$ $87/185 \times 100\% = 47,03\%$	Dinas Tenaga Kerja
		2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$ $6/12 \times 100\% = 50\%$	Dinas Tenaga Kerja
		3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yg tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yg tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	20	Dinas Tenaga Kerja
		4) Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengoreksi surat kerja (yang dalam PP dan PKB)}} \times 100\%$ $42/(87+6) \times 100\% = 45,16\%$	Dinas Tenaga Kerja
		5) Persentase perusahaan yg telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$ $141/433 \times 100\% = 32,56\%$	Dinas Tenaga Kerja
		6) Persentase perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja

			$3/433 \times 100\% = 0,69\%$	
		7) Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja
		8) Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja
		9) Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas Tenaga Kerja
		10) Jumlah perselisihan antar SP/SB dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja
		11) Jumlah perselisihan PHK	2	Dinas Tenaga Kerja
		12) Jumlah pekerja/buruh yang ter PHK	33	Dinas Tenaga Kerja
		13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2	Dinas Tenaga Kerja
		14) Lembaga kerja sama (LKS) tripartite kabupaten yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja
		15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n} \times \text{jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$ $2/3 \times 100\% = 66,66\%$	Dinas Tenaga Kerja
	5	1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	30.600 lowongan	Dinas Tenaga Kerja
		2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar	12.171 pencari	Dinas Tenaga Kerja

			3) Jumlah bursa kerja khusus (BKK)	60	Dinas Tenaga Kerja
			4) Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dlm satu kabuapten	0	Dinas Tenaga Kerja
			5) Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	3	Dinas Tenaga Kerja
			6) Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swsta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kabupaten	0	Dinas Tenaga Kerja
			7) Jumlah perjanjian kerja yg disahkan oleh dinas/bidang ketenagakerjaan kab.	6.526	Dinas Tenaga Kerja
			8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (SISNAKER)	10.621 orang	Dinas Tenaga Kerja
			9) Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yg mendapat sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTNI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTNI}} \times 100\%$ 892/892x100%=100%	Dinas Tenaga Kerja
			10) Jumlah calon pekerja migran Indonesia	892 orang	Dinas Tenaga Kerja

			(CPMI)/calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		
			11) Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepelangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$ 0	Dinas Tenaga Kerja
			12) Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \frac{\text{PMI}}{\text{TKI}} \text{ yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \frac{\text{PMI}}{\text{TKI}}} \times 100\%$ 892/892 x 100% = 100%	Dinas Tenaga Kerja
			13) Data jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$ 0	Dinas Tenaga Kerja
			14) Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yg dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$ 0/3 x 100% = 0%	Dinas Tenaga Kerja
2	Transmigrasi	1	1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Dinas Tenaga Kerja
			2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja

			3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Dinas Tenaga Kerja
--	--	--	--	---	--------------------

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG
DISHAKER

Dr. Drs. MOH SIDIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196609231993031003